

Pemerintah Luncurkan Trisula Program Rakyat

Dari Halaman 1

cita Indonesia emas pada 2045. Ketiga program yang akan diluncurkan itu meliputi Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Hasan mengatakan, sekolah rakyat akan diluncurkan sekitar akhir Juli 2025 ini. Ia menyampaikan akan ada 100 sekolah rakyat yang diluncurkan pada tahun pertama program. "Yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim.

Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan," ucapnya.

Kedua, ialah kelanjutan cek kesehatan gratis, khususnya cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah. Ia mengatakan program itu nantinya akan menasar anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. "Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan screening TBC, dan juga pemeriksaan kejiwaan," ujarnya. Lalu program ketiga yang akan diluncurkan ialah program Koperasi Desa Merah

Putih. Ia menyebut program ini akan diluncurkan oleh Prabowo pada 19 Juli.

"Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia," ujar dia. "Nah, dengan melaksanakan tiga program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerintahan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis," imbuhnya.(cnni/js)

100 Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi

Dari Halaman 1

memenuhi persyaratan, sudah ada 100 lebih," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/7).

Adapun peluncuran resmi Kopdes Merah Putih diagendakan pada 19 Juli 2025 dan akan dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini akan diikuti seluruh provinsi dan kabupaten, dengan kehadiran kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga lurah dan aparat kelurahan.

Zulhas menambahkan pembentukan koperasi ini dilakukan bertahap, dengan menekankan kesiapan unit usaha sebelum mengakses pem-

biayaan.

"Kalau bisa tiap kabupaten ada, belum sempurna pun tidak apa-apa. Karena sempurnanya nanti kita di akhir tahun," kata dia.

Ia menjelaskan Kopdes akan mendapat plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dari bank anggota Himbara, namun hanya setelah rencana usahanya jelas.

"Dan ini bukan dari APBN, ini pinjaman," tambahnya.

Program ini dikembangkan lewat kerja sama lintas pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga keuangan. Beberapa perusahaan pelat merah yang turut dilibatkan antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah Indone-

sia, Perum Bulog, dan ID Food.

Ia juga merinci sejumlah fasilitas yang akan tersedia di prototipe Kopdes di Klaten. Di antaranya agen pupuk, gerai gas melon, sembako, armada angkut hasil panen, layanan perbankan digital, hingga kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk distribusi bantuan pemerintah.

Selain itu, fasilitas seperti klinik, apotek, serta gudang penyimpanan gabah dan jagung juga disiapkan di tingkat desa. Zulhas menyebut program ini ditujukan untuk memperpendek rantai distribusi logistik dan menekan peran tengkulak di daerah.

"Bayangin kita akan punya 80 ribu gudang," ujarnya.(cnni/js)

Nadiem Mangkir Panggilan Kejagung

Dari Halaman 1

Nadiem dijadwalkan penyidik untuk pemeriksaan lanjutan pada Selasa (8/7) kemarin.

Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris menyebut kliennya telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

"Ditunda satu minggu," ujar Hotman Paris Hutapea selaku Kuasa Hukum Nadiem saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Senada, kuasa hukum Nadiem lainnya Hana Pertiwi juga membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya telah ditunda. Kendati demikian, ia tak menjelaskan alasan Nadiem tidak bisa memenuhi panggilan penyidik.

Selain itu ketika disinggung kapan pemeriksaan itu akan kembali digelar Ia mengaku belum mengetahui dan masih menunggu informasi lanjutan dari penyidik.

"Belum tahu (soal jadwal pemanggilan pemeriksaan) tergantung panggilan selanjutnya," tuturnya. Kejaksanaan Agung (Kejagung) diketahui me-

manggil mantan Mendikbud Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, panggilan pemeriksaan itu sedianya dilakukan pada Selasa (8/7) di Gedung Bundar Kejagung.

"Untuk pemeriksaan Nadiem sesuai surat panggilan rencana hari ini Selasa 8 Juli 2025, pukul 09.00 WIB," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Nadiem telah diperiksa penyidik Kejagung, pada Senin (23/6) selama 12 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Ia tidak menjelaskan lebih jauh ihwal materi yang dialami oleh penyidik, hanya saja Nadiem berjanji bersikap kooperatif membantu penyidik.

"Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yg telah kita bangun bersama," tuturnya. Sebelumnya Harli menyebut salah satu ma-

teri pemeriksaan yang dialami penyidik terhadap Nadiem terkait kegiatan rapat yang diduga untuk merubah hasil kajian teknis pengadaan laptop Chromebook.

"Ada hal yang sangat penting didalam oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat yang terjadi pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu sudah dilakukan sejak bulan April," jelasnya.

Harli menjelaskan dalam rapat yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2020 itu penyidik menduga terdapat pengkondisian hasil kajian teknis penggunaan laptop Chromebook yang telah dilakukan.

Ia menyebut rapat itulah yang kemudian diduga penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menjadi dasar pengadaan laptop Chromebook meskipun dinilai tidak efektif untuk pembelajaran.

"Pada akhirnya (kajian teknis) diubah di bulan, kalau saya enggak salah di Juni atau Juli. Tetapi sebelum itu ada rapat tanggal 6 Mei 2020 dan oleh penyidik ini yang dialami," tuturnya.(cnni/js)

PDIP Dukung Gibran Berkantor di Papua

Dari Halaman 1

gan hingga keamanan. "Nah itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah Gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," kata Deddy di kompleks parlemen, Selasa (8/7).

Dia enggan berspekulasi bahwa keputusan Prabowo mengirim Gibran sebagai upaya untuk mengurangi tugas-tugasnya. Menurut Deddy, ada persoalan serius yang harus diselesaikan pemerintah di Papua, termasuk soal food estate. "Jangan begitu, itu negatif, kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali. Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak

terjadi pemeriksaan yang didalam penyidik terhadap Nadiem terkait kegiatan rapat yang diduga untuk merubah hasil kajian teknis pengadaan laptop Chromebook.

Daddy menyarankan Gibran agar terlebih dahulu memahami kondisi Papua sebelum resmi terjun ke lapangan. Gibran perlu membuka dialog dengan tokoh dan pemerintah setempat, maupun sejarawan.

"Ya tentu dia harus memahami, memanggil dulu tokoh-tokoh Papua. Para sejarawan, sosiolog. Dengan Kementerian dalam Negeri, kementerian lain yang bersentuhan dengan Papua," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua.

Menurut Yusril, Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus per-

masalah HAM.

Menurut dia, tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana mengenai penugasan khusus Gibran di Papua. Wartawan telah menghubungi Mensesneg Prasetyo Hadi menanyakan perihal ini, namun yang bersangkutan belum merespons.(cnni/js)

Umat Islam Harus Cermat Menyikapi Informasi

Dari Halaman 1

digital. Ia mengutip klasifikasi yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Al Khattab RA, bahwa umat Islam terbagi dalam empat kelompok saat merespons berita keagamaan dan sosial yakni (1) Mereka yang memahami Islam dan agama lain, (2) Mereka yang memahami Islam tetapi tidak memahami agama lain, (3) Mereka yang tidak memahami Islam namun memahami agama lain, (4) Mereka yang tidak memahami Islam dan juga tidak memahami agama lain. "Kelompok pertama adalah yang paling ilmiah dan membawa masalah. Mereka inilah yang seharusnya menjadi panutan dalam menyik-

kapi informasi. Tiga kelompok lainnya justru berpotensi menimbulkan mafsadat atau kerusakan," ungkap Ustaz Mansyur.

Ia menyortir fenomena terbaru saat serangan militer Iran terhadap Israel terjadi. Banyak umat Islam di Indonesia memberikan dukungan kepada Iran tanpa memahami secara mendalam latar belakang ideologi negara tersebut.

"Sebagian umat menilai Iran sebagai negara Islam pemberani yang membela Palestina. Padahal, mayoritas ulama sepakat bahwa Iran bukan negara dengan mayoritas Sunni, melainkan Syiah," tegasnya.

Kekeliruan dalam memahami perbedaan ini, lanjut Ustaz Mansyur, timbul karena kurangnya literasi keagamaan di kalangan umat Islam, khususnya terkait ajaran Syiah.

Ia mengingatkan bahwa ketidaktahuan ini

bisa menimbulkan tujuh dampak serius. (1), Yang batil mengalahkan yang hak, (2) Merosotnya kepercayaan sesama umat Islam, (3) Timbulnya intoleransi internal, (4) Rapuhnya persatuan umat, (5) Perpecahan antar sesama Muslim, (6) Salah dalam menempatkan cinta karena Allah, (7) Musuh dianggap kawan, kawan dianggap musuh.

Ustaz Mansyur mengimbau para dai dan tokoh agama agar memperkuat dakwah berbasis literasi dan diskusi ilmiah. Hal ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya salah paham yang membahayakan akidah dan persatuan umat Islam.

"Para dai harus menjadi cahaya pencerah di tengah derasnya informasi, agar umat tidak terjebak pada penilaian emosional yang tidak berpijak pada ilmu," pungkasnya.(A-10)

Wajah Terbungkus Lakban

Dari Halaman 1

wartawan. Lantaran korban tak bisa dihubungi, sang istri lantas menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban.

Rezha mengatakan, penjaga kos kemudian mengecek ke kamar kos dan menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. "Dicek, diketuk-ketuk, nah mungkin (langsung ditemukan korban). Dari olah TKP, memang ada dibuka paksa untuk mengetahui korban di dalam bagaimana," ujarnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membenarkan bahwa pria yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi wajah terbungkus lakban di Menteng, Jakarta Pusat, merupakan staf mereka.

Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah 'Roy' Soemirat mengatakan bahwa ADP benar merupakan staf atau diplomat Kemlu dan telah meninggal dunia di kediamannya.

"Betul, salah satu staf Kemenlu, saudara. ADP telah meninggal dunia di kediamannya di Gondangdia," kata Roy dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7).

tempat kejadian perkara (TKP), barang milik korban juga tidak ada yang hilang. Bahkan, pihaknya juga tak menemukan ada tanda kerusakan di kamar kos korban.

"(Kondisi kosan) terkunci dari dalam," katanya.(cnni/js)

Kemlu RI menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang bersangkutan. Almarhum ADP disebut meninggalkan seorang istri dan dua orang anak.

"Saat ini Kementerian Luar Negeri telah menyerahkan proses penanganan peristiwa ini kepada pihak yang berwenang dan akan terus memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses yang berlangsung," ucap Roy.

Sebelumnya, seorang pria berinisial ADP (39) ditemukan tewas dalam kondisi muka terbungkus isolasi di sebuah kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB.

"Iya benar ada penemuan mayat, iya betul (kepala terbungkus isolasi)," kata Rezha saat dikonfirmasi.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Rencananya, akan dilakukan proses autopsi untuk memastikan penyebab kematian, namun masih menunggu pihak keluarga.

"Kalau visum luarnya sih tidak ada tanda-tanda kekerasan," ujarnya.

Rezha turut membeberkan dari hasil olah

KKB Bakar

Dari Halaman 1

Bupati Elvis Tabuni lantaran dipakai sebagai pos militer. Akan tetapi, ia menegakkan klaim KKB tersebut tidaklah benar dan bagian dari propaganda yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik. Faizal memastikan dua unit rumah Bupati itu telah ditinggalkan sejak lama dan tidak lagi ditempati.

"Narasi ini digunakan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka serta memengaruhi dan menghasut warga, sedangkan hal tersebut tidaklah benar" ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7).

Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati dan Kantor Distrik, Faizal mengatakan pihaknya juga mencatat terdapat empat bangunan yang dibakar KKB.

Rinciannya satu gereja di Kampung Pinapa, Distrik Omukia; kemudian Rumah dinas Pemda di Kampung Pinapa; Puskesmas di Kampung Pinapa; serta satu sekolah dan Kantor Desa di Kampung Pinggil, Distrik Omukia.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menyebut klaim penempatan militer di rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia sengaja dilakukan untuk menimbulkan terhadap warga di kampung halaman mereka.

"Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat," katanya.(cnni/js)



Trisula Rakyat Gagasan Ambisius

Dari Halaman 1

Di atas kertas, ini adalah visi yang menjanjikan. Ia menyentuh langsung tiga aspek kehidupan rakyat kecil: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, sebagaimana banyak kebijakan populis lainnya, program ini juga menyimpan berbagai potensi persoalan jika tidak dijalankan secara hati-hati, transparan, dan partisipatif.

Salah satu program utama adalah pembangunan 100 Sekolah Rakyat berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Ini adalah terobosan penting dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Namun, kita patut bertanya: mengapa membangun sekolah baru, sementara ribuan madrasah dan sekolah negeri di desa-desa masih kekurangan fasilitas dan guru?

Ada risiko tumpang tindih antara Sekolah Rakyat dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. Lebih buruk lagi, ini bisa menjadi duplikasi anggaran jika pemerintah tidak menyelaraskan program ini dengan Kemendikbud, Kemenag, dan pemda. Membangun sekolah baru jauh lebih mahal daripada memperkuat yang sudah ada. Apakah ini efisien? Apakah benar-benar dibutuhkan?

Pilar kedua, Cek Kesehatan Gratis di Sekolah, juga terdengar progresif. Pemeriksaan kesehatan gigi, mata, telinga, hingga skrining TBC dan kesehatan mental secara massal di sekolah-sekolah bisa berdampak besar jika dilakukan rutin dan terpadu. Namun, jika hanya dilakukan sekali atau bersifat seremonial, apa gunanya pemeriksaan tanpa sistem rujukan dan tindak lanjut?

Program ini memerlukan sistem yang saling terintegrasi antara sekolah, Puskesmas, dan rumah sakit. Tanpa sistem yang kuat, apa yang bisa dilakukan sekolah jika siswa didiagnosis TBC? Tanpa anggaran penanganan, kegiatan ini justru bisa menjadi beban administratif bagi guru dan tenaga kesehatan yang sudah kewalahan.

Pilar ketiga adalah yang paling ambisius: membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa. Namun, koperasi bukanlah sekedar bangunan fisik atau legalitas administratif. Ia adalah entitas sosial yang hanya bisa hidup jika ada partisipasi, kepercayaan, dan akuntabilitas warga.

Pertanyaan mendasarnya: siapa yang akan mengelola koperasi ini? Apakah masyarakat dilibatkan sejak awal? Jangan sampai koperasi-koperasi ini menjadi "koperasi papan nama" seperti banyak contoh di masa lalu—dibentuk atas nama rakyat, tapi dikuasai oleh segelintir elite desa, bahkan dimonopoli oleh aparat.

Kita tahu dari pengalaman bahwa koperasi yang lahir dari atas sering kali gagal. Tanpa pelatihan, pendampingan, dan mekanisme kontrol internal, koperasi akan mandek, bahkan rentan menjadi sarang korupsi skala kecil.

Waktu peluncuran program ini—yakni menjelang HUT ke-80 RI dan tahun pertama pemerintahan—membuat sebagian kalangan skeptis. Apakah Trisula Rakyat ini benar-benar sebuah rencana pembangunan jangka panjang, atau hanya bagian dari proyek pencitraan kekuasaan?

Di banyak negara berkembang, proyek-proyek besar kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik. Padahal, pembangunan sejati bukan tentang membangun sesuatu yang terlihat, tapi memperbaiki sesuatu yang mendasar: sistem, partisipasi warga, dan keadilan distribusi.

Jika Trisula Rakyat hanya dipakai untuk mendongkrak popularitas pemerintah, tanpa dasar data, kebutuhan lokal, dan evaluasi independen, maka ia akan berbasir sama seperti banyak proyek populis lainnya: menguap seiring bergantinya anggaran.

Setidaknya ada empat tantangan utama yang harus diantisipasi:

1. Transparansi Anggaran: Belum ada penjelasan rinci dari pemerintah tentang dari mana pembiayaan program ini berasal. Apakah dari APBN, Dana Desa, atau utang luar negeri? Publik berhak tahu dan mengawasi.

2. Kesiapan SDM: Sekolah dan koperasi membutuhkan guru, manajer, pengawas, tenaga medis, dan pendamping profesional. Apakah SDM tersedia? Siapa yang melatih dan mengawasi?

3. Keberlanjutan Program: Apakah program ini dirancang untuk jangka panjang, atau hanya proyek 1–2 tahun? Adakah mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif?

4. Pemerintahan Wilayah: Jangan sampai 100 Sekolah Rakyat dan koperasi desa hanya dibangun di Jawa atau daerah yang dekat dengan elite politik, sementara kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) kembali tertinggal.

Penutup
Trisula Rakyat bisa menjadi senjata tajam melawan kemiskinan, atau hanya "pedang tumpul" penuh simbolisme. Semua tergantung bagaimana pemerintah merancang, menjalankan, dan mengawasi program ini.

Sebagai warga negara, kita perlu optimistis sekaligus kritis. Dukungan publik penting, tetapi pengawasan lebih penting. Program ini harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan ambisi politik elite. Hanya dengan keterlibatan semua pihak—pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan media—Trisula Rakyat bisa menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan setara.

